

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Dewi Bunga, Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional), Udayana University Press, Bali, 2011.
- Ende Hasbi Nassarudin, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Kartono Kartini, Patologi Sosial, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005.
- N. Drijarkara, Percikan Filsafat, PT Pembangunan, Jakarta, 1989.
- Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih Gunarsa, Psikologi Remaja, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2005.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Purnomo. T., Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kompleks Pelacuran Dolly, Grafity Pers, Jakarta, 2010.
- Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, UMM Press, Malang, 2020.
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Sahat Maruli T. Situmeang, Buju Ajar Kriminologi, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono D., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997.
- Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Yermil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial.